



- 02** GOVERNMENTTODAY
Saling Tuding di Tanjung Priok Buntut Kontainer Menumpuk
- 05** NUSANTARA
Gempa M 6,7 Guncang Palu, Lebih dari 45 Guncangan Susulan Terjadi
- 10** LISTSTYLE
Sepatu Pink Kuasai Piala Dunia 2026, Sekadar Gaya atau Strategi Visual?

Palu Porak-poranda Diguncang Gempa

Seorang anak mengamati bangunan yang rusak akibat gempa magnitudo 6,7 yang mengguncang Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (16/6/2026). Gempa yang berpusat 42 kilometer tenggara Kota Palu dengan kedalaman 10 kilometer itu tidak berpotensi tsunami, namun guncangannya yang terasa kuat selama 4-6 detik memicu kepanikan warga dan merusak sejumlah infrastruktur. Peristiwa ini kembali mengingatkan tingginya aktivitas seismik di Sulawesi Tengah yang dalam 85 tahun terakhir telah mengalami sedikitnya sepuluh gempa besar, beberapa di antaranya disertai tsunami. Baca berita lengkap hal.5.(ant.ist)

JEJAK PROGRAM

KOMPOR LISTRIK PLN 2022 BATAL

Tujuan Awal Program

- ⊗ Mengurangi impor LPG 3 kg
- ⊗ Menyerap surplus listrik PLN
- ⊗ Mendorong transisi energi rumah tangga

Fakta Program

- ✓ Menyaras pelanggan LPG 3 kg
- ✓ Pilot project untuk 300.000 rumah tangga
- ✓ Kompor induksi dibagikan gratis pada tahap awal

KOMPOR LISTRIK: GAGAL, LALU DIULANG

Program konversi kompor elpiji 3 kilogram ke kompor listrik yang sempat kandas pada 2022 kini kembali muncul di meja pemerintah. Dulu program ini dibatalkan setelah memicu penolakan luas. Banyak rumah tangga sasaran menggunakan listrik 450 VA dan 900 VA yang dinilai tidak memadai untuk mengoperasikan kompor listrik. Kekhawatiran soal beban daya, kesiapan infrastruktur, hingga biaya tambahan bagi masyarakat menjadi penyebab utama. Empat tahun berlalu, pemerintah kembali mengusulkan program serupa dengan anggaran Rp815,56 miliar. Alasannya masih sama yaitu menekan impor dan subsidi LPG 3 kilogram yang terus membengkak. Bedanya, pemerintah mengklaim teknologi kompor yang akan digunakan kini lebih efisien dan lebih sesuai dengan kebutuhan rakyat. Saat ingatan publik atas kegagalan sebelumnya masih membekas, kemunculan kembali program ini memicu pertanyaan mendasar: apakah pemerintah telah benar-benar memperbaiki akar persoalan, atau justru sedang mengulang kebijakan lama dengan kemasan baru? BACA HAL 11...

Alasan Program Gagal

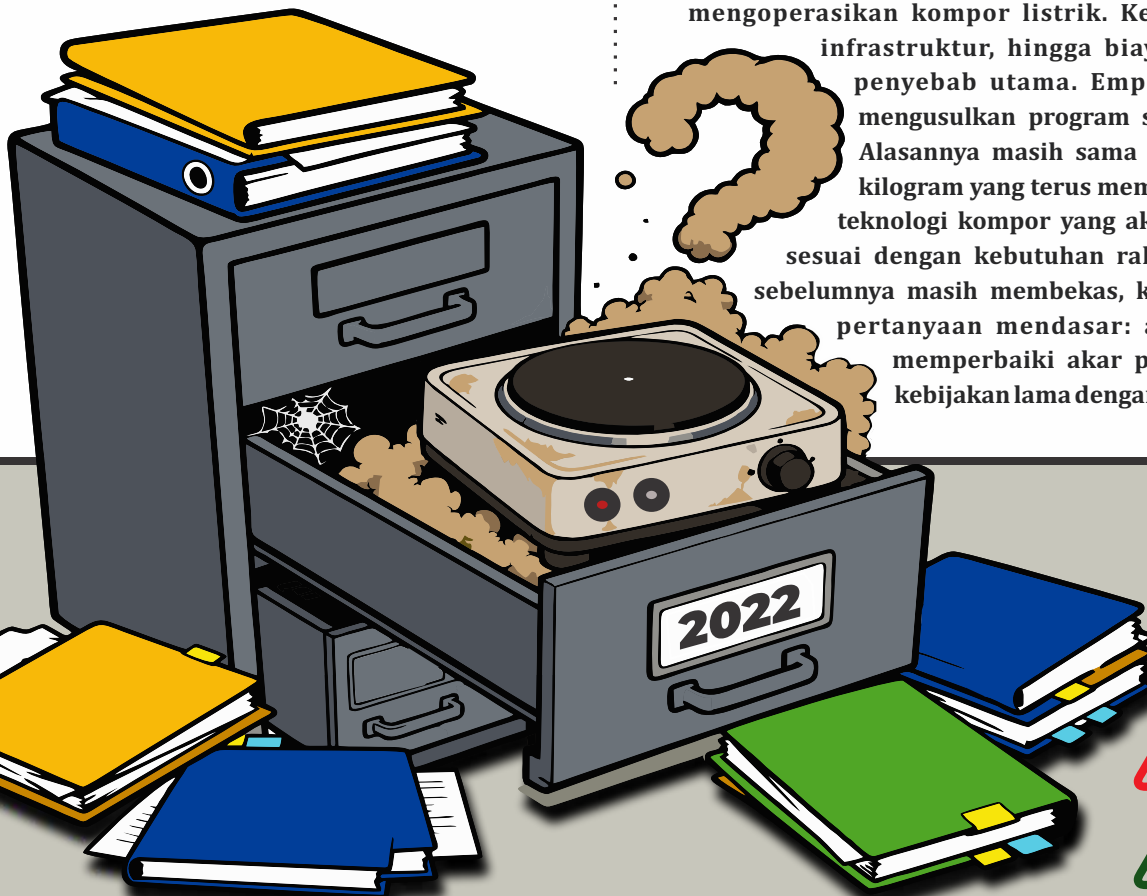
- ⊗ Mayoritas pelanggan hanya memiliki daya 450 VA-900 VA
- ⊗ Kompor induksi membutuhkan daya sekitar 1.800 watt atau lebih
- ⊗ Masyarakat harus menambah daya listrik
- ⊗ Perlu membeli panci dan wajan khusus
- ⊗ Kekhawatiran tagihan listrik meningkat
- ⊗ DPR menilai kajian program belum matang

KEPUTUSAN

September 2022: PLN membatalkan program konversi LPG 3 kg ke kompor listrik induksi. Pemerintah beralih mendorong pengembangan Jargas untuk mengurangi impor LPG.

RENCANA TERBARU

Juni 2026: Menteri ESDM Bahilil Lahadalia mengusulkan anggaran Rp815,59 miliar untuk menyiapkan program kompor listrik generasi baru pada 2027.



Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menegaskan bahwa lonjakan kontainer bukan disebabkan lambatnya pelayanan kepabeanan. Menurutnya, proses administrasi impor telah berjalan sesuai standar nasional, namun banyak perusahaan tidak segera mengeluarkan barang meski Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) sudah diterbitkan.

Dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Djaka mengatakan pelayanan keluar masuk barang oleh Bea Cukai telah sesuai standar yang diharapkan. Namun setelah proses kepabeanan selesai, kontainer masih menumpuk karena pelaku usaha tidak segera mengeluarkan barang dari kawasan pelabuhan.

"Ketika kontainer-kontainer tersebut sudah mengalami pengeluaran barang, ini masih terjadi penumpukan karena para pelaku tidak dengan segera melakukan pengeluaran," kata Djaka dikutip *Srlasa* (16/6).

Ia bahkan menyinggung sejumlah perusahaan otomatis, termasuk BYD dan Wuling, yang disebut masih memanfaatkan fasilitas penyimpanan di

SALING TUDING DI TANJUNG PRIOK BUNTUT KONTAINER MENUMPUK

Penumpukan ribuan kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok memicu saling tuding antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan kalangan importir. Kedua pihak sama-sama mengklaim memiliki alasan kuat terkait membengkaknya *dwelling time* atau waktu tunggu barang di pelabuhan yang sempat mengganggu arus logistik nasional.



pelabuhan selama tiga hari setelah SPPB diterbitkan. Menurutnya, terdapat pula kontainer yang tetap berada di pelabuhan lebih dari dua minggu setelah izin keluar diperoleh.

"Contohnya seperti BYD kemudian dari Wuling itu masih memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pelabuhan selama tiga hari setelah SPPB keluar. Malah bahkan lebih dari dua minggu dia

tidak angkat keluar. Kemarin itu hampir sekitar 10 ribu kontainer yang masih ada di pelabuhan," ujarnya.

Djaka menilai kondisi itu terjadi karena perusahaan mengalami keterbatasan tempat penyimpanan di luar pelabuhan. Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan dinilai lebih murah apabila barang tetap berada di area pelabuhan.

"Itu yang dimanfaatkan oleh perusahaan karena kesulitan tempat di luar sehingga mereka dengan mengingat *cost* yang lebih murah daripada di luar, mereka dengan memanfaatkan itu," katanya.

Karena itu, DJBC mengaku telah melakukan langkah tegas dengan memaksa perusahaan segera mengeluarkan kontainer dari kawasan pelabuhan. Ke depan, Bea Cukai juga berencana mendorong pemindahan barang ke lini II atau lokasi penumpukan di luar pelabuhan setelah seluruh proses kepabeanan selesai.

"Kita melakukan pemaksaan kepada perusahaan tersebut untuk dengan secepatnya melakukan pengeluaran dari area pelabuhan," ujar Djaka.

Namun tudingan tersebut langsung dibantah oleh Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI). Ketua Umum BPP GINSI Subandi menyebut anggapan bahwa importir sengaja menahan kontainer karena biaya di pelabuhan lebih murah sebagai pernyataan yang tidak tepat.

"Jika ada yang mengatakan biaya di pelabuhan murah hingga pemilik barang sengaja menimbun barang di pelabuhan, berarti tidak paham biaya di pelabuhan," kata Subandi.

Menurutnya, biaya penumpukan kontainer justru sangat mahal. Untuk peti kemas ukuran 20 kaki, biaya penumpukan mencapai Rp2,83 juta per hari, sedangkan kontainer ukuran 40 kaki mencapai Rp5,66 juta per hari termasuk PPN.

"Coba buktikan, adakah biaya penumpukan peti kemas di tempat lain yang lebih murah dari ini," ujarnya.

Subandi menjelaskan biaya tersebut bahkan belum termasuk demurrage atau denda keterlambatan pengembalian kontainer kepada perusahaan pelayaran yang berkisar antara US\$80 hingga US\$160 per hari.

Ia juga membantah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut biaya penyimpanan di pelabuhan lebih murah dibandingkan di luar kawasan pelabuhan. Menurut Subandi, usulan agar kontainer yang telah memperoleh SPPB dipindahkan ke lokasi non-Tempat Penimbunan Sementara sebenarnya sudah lama diajukan, namun tidak mendapat persetujuan Bea Cukai. (*wid,ist/dya*)

PERKEMBANGAN VOLUME IMPOR MOBIL CBU KE INDONESIA

Tahun 2025

- 176.593 Unit
- Melejit 82,04%, dipicu oleh banjir impor massal mobil listrik.

Tahun 2024

- 97.010 Unit
- Normalisasi suplai logistik global pasca-pandemi.

Tahun 2023

- 88.915 Unit
- Pertumbuhan stabil seiring masuknya model-model kendaraan baru.

Tahun 2022

- 83.298 Unit
- Pemulihan pasar domestik; permintaan mobil premium & SUV meningkat.

Tahun 2021

- 47.779 Unit
- Pemulihan awal dari titik terendah pandemi Covid-19.

- Volume Impor Mobil CBU
- Dinamika Pasar & Faktor Pengaruh

Kemenkeu Siapkan Sanksi

Sadewa saat meninjau langsung kondisi Pelabuhan Tanjung Priok pada 6 Juni 2026, meminta jajarannya menyusun regulasi yang memungkinkan pemberian sanksi terhadap importir yang terlalu lama membiarkan barang berada di pelabuhan.

Langkah tersebut diambil untuk menekan *dwelling time* atau waktu tunggu kontainer yang dinilai berpotensi mengganggu kelancaran distribusi logistik nasional.

Sementara itu, ekonom menilai penumpukan sekitar 10.000 kontainer di Tanjung Priok tidak hanya menjadi persoalan kepabeanan, tetapi juga telah berdampak pada rantai pasok nasional. Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, mengatakan kontainer yang sudah mengantongi SPPB seharusnya segera keluar dari pelabuhan agar fungsi pelabuhan sebagai simpul logistik tetap berjalan optimal.

"Ini menunjukkan bahwa pelabuhan sedang dipakai seperti gudang murah. Dalam jangka pendek, hal ini mungkin menguntungkan sebagian importir karena biaya simpan lebih rendah, tetapi dalam skala besar

dampaknya merugikan ekonomi nasional karena perputaran kontainer melambat," ujar Josua.

Ia menjelaskan bahwa penumpukan kontainer mengurangi kapasitas lapangan penumpukan, memperlambat proses bongkar muat kapal, serta meningkatkan antrean kendaraan logistik di kawasan pelabuhan. Akibatnya, distribusi barang ke sektor industri dan perdagangan menjadi kurang efisien.

Menurut Josua, perusahaan akhirnya harus menyediakan stok cadangan lebih besar untuk mengantisipasi keterlambatan pasokan. Kondisi tersebut meningkatkan kebutuhan modal kerja sekaligus menurunkan efisiensi operasional.

Selain mengganggu rantai pasok, penumpukan kontainer juga berpotensi meningkatkan biaya logistik. Biaya tambahan tidak hanya berasal dari penyimpanan barang, tetapi juga muncul akibat keterlambatan distribusi, penjadwalan ulang pengiriman, biaya transportasi tambahan, hingga ketidakpastian waktu kedatangan barang. (*tin,rls/dya*)

KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) mulai mengevaluasi aturan terkait penumpukan kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok setelah ditemukan sekitar 10.000 kontainer yang masih tertahan di kawasan pelabuhan. Pemerintah bahkan menyiapkan aturan sanksi bagi importir yang membiarkan barang terlalu lama berada di area pelabuhan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi

SETERU PDIP-PSI:

DARI JOKOWI HINGGA PEREBUTAN KADER

Setelah berpisah jalan dengan PDIP, Jokowi menjadi titik paling sensitif dalam hubungan partai berlambang banteng itu dengan PSI. Partai yang kini dipimpin putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, berulang kali menyatakan keterbukaannya terhadap mantan presiden tersebut, bahkan sejumlah kader PSI mendorong Jokowi menjadi pemimpin partai. Di saat yang sama, elite PDIP menuding PSI aktif menggaet kader dari berbagai partai, termasuk PDIP, sehingga memunculkan tuduhan "pembajakan kader". Persaingan yang semula berpusat pada figur Jokowi kini menjalar ke perebutan jaringan politik dan basis massa menjelang Pemilu 2029

Hubungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali memanas. Setelah berselisih soal posisi politik Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), kini kedua partai terlibat saling tuding terkait upaya perekrutan kader di daerah.

PDIP menilai PSI tengah menjalankan strategi ekspansi politik dengan membujuk kader-kader partai lain untuk bergabung. Sebaliknya, PSI membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa fokus utama



(Ilustrasi) Fenomena saling pindah kader antara PDIP Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) semakin marak terjadi.

partai saat ini adalah memperkuat struktur organisasi menjelang proses verifikasi kepartaian.

Polemik terbaru ini memperlihatkan bahwa persaingan antara kedua partai tidak lagi sekadar terkait

figur Jokowi, melainkan juga menyangkut perebutan jaringan politik dan sumber daya kader menjelang kontestasi politik berikutnya.

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri

EKS KADER PDIP BERGABUNG KE PSI

Febry Calvin Tetelepta (FCT)

Resmi bergabung dengan PSI pada Mei 2026 setelah bertemu Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, untuk melanjutkan semangat pembangunan era Jokowi.

Ginda Ferachtriawan

Bergabung dengan PSI pada 10 Agustus 2025 setelah mengundurkan diri dari PDIP pada Juli 2025.

Wawanto

Masuk PSI pada 10 Agustus 2025 setelah meninggalkan PDIP yang telah ia ikuti sejak 1989 karena merasa ruang komunikasi semakin terbatas.

Dyah Retno Pratiwi

Bergabung dengan PSI pada 10 Agustus 2025 setelah diberhentikan dari partai lamanya akibat perbedaan dukungan politik.

PSI Tegaskan Blusukan Jokowi Penuhi Undangan Masyarakat

kepala negara itu.

Wakil Ketua Umum DPP PSI, Isyana Bagoes Oka, menjelaskan bahwa agenda yang akan dijalani Jokowi tidak bisa dikategorikan sebagai safari politik sebagaimana yang ramai diberitakan selama ini.

"Sebenarnya ini bukan safari politik sebetulnya. Ini lebih ke arah bagaimana seperti yang sudah disampaikan pak Jokowi itu memenuhi undangan-undangan dari masyarakat, termasuk juga kalau ada kegiatan-kegiatan di Partai Solidaritas Indonesia," ujar Isyana usai menghadiri kegiatan santunan anak yatim dan dhuafa di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Selasa (16/6/2026).

Pernyataan senada juga disampaikan Isyana ketika dimintai keterangan di Kantor DPP PSI terkait rencana Jokowi berkeliling ke sejumlah daerah di Indonesia.

Menurut dia, kunjungan tersebut merupakan bentuk respons Jokowi

terhadap banyaknya undangan yang datang dari masyarakat di berbagai wilayah.

"Ini lebih ke arah bagaimana seperti yang sudah disampaikan Pak Jokowi itu memenuhi undangan-undangan dari masyarakat, termasuk juga kalau ada kegiatan-kegiatan di Partai Solidaritas Indonesia," kata Isyana.

Ia menambahkan bahwa kondisi kesehatan Jokowi saat ini sudah baik sehingga memungkinkan untuk kembali melakukan berbagai aktivitas di lapangan.

"Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa ini adalah bagian dari rencana pak Jokowi untuk memenuhi undangan-undangan karena pak Jokowi kondisinya sekarang sudah sehat," imbuhnya.

Saat ditanya mengenai kapan tepatnya agenda perjalanan nasional Jokowi akan dimulai, PSI belum bersedia memberikan informasi secara rinci kepada publik. "Tunggu aja ya," kata Isyana (tin,ist/dya)

Hanteru Sitorus mengatakan partainya terus memantau berbagai langkah politik PSI di daerah. Menurut dia, pengawasan itu dilakukan terhadap berbagai pendekatan yang disebut menasar anggota legislatif, kepala daerah, pengurus partai hingga kader akar rumput.

Pernyataan tersebut disampaikan Deddy ketika menanggapi kabar yang menyebut Jokowi akan menempati posisi Ketua Dewan Pembina PSI.

Menurut Deddy, kedekatan Jokowi dengan PSI bukanlah hal baru. Ia menyebut hubungan itu sudah terjalin sejak lama, terlebih setelah Kaesang Pangarep menjabat sebagai Ketua Umum PSI.

"Memangnya dari dulu dia tidak di PSI, kan anaknya (Kaesang Pangarep) sudah Ketua Umum dan sebelum itu dia membesarkan PSI dengan merekrut orang-orangnya di pemerintahan dan BUMN," kata Deddy, Selasa (16/6).

Bagi PDIP, kata Deddy, persoalan mengenai Jokowi sebenarnya sudah selesai sejak mantan presiden itu tidak lagi menjadi anggota partai.

"Bagi kami, urusan dengan Jokowi sudah selesai, sudah dipecah dari keanggotaan partai. Jadi dia mau pakai jaket partai apa pun, itu urusan Jokowi," ujarnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PDIP berusaha memisahkan diri dari dinamika politik Jokowi setelah hubungan keduanya memburuk menjelang dan sesudah Pemilu 2024.

Meski mengaku tidak khawatir, Deddy menegaskan partainya tetap mencermati perkembangan politik PSI, terutama jika nantinya Jokowi resmi masuk dalam struktur partai tersebut.

Menurut dia, masih terlalu dini untuk menilai apakah kehadiran Jokowi akan memberikan dampak signifikan terhadap kekuatan elektoral PSI maupun posisi PDIP.

"Apakah akan berdampak pada PDIP Perjuangan? Kita lihat saja nanti karena pemilu masih jauh. Kami terus mengawasi gerakan mereka yang terus menerus berusaha membujuk kader-kader PDIP untuk masuk PSI di berbagai daerah, baik anggota dewan, kepala daerah, hingga pengurus partai dan kader," ungkap Deddy.

Tuduhan mengenai upaya perekrutan kader itu menjadi salah satu isu yang paling disorot. Deddy mengaku menerima berbagai informasi yang menyebut adanya tawaran tertentu kepada kader yang diajak berpindah partai.

"Menurut info yang saya dengar, bahkan rata-rata ditawarkan bantuan material yang lumayan. Tidak tahu kebenarannya. Terus terang kami tidak takut," tuturnya.

Meski demikian, Deddy mengakui bahwa informasi tersebut belum dapat diverifikasi sepenuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deddy juga menyinggung hasil Pemilu 2024 yang gagal membawa PSI menembus ambang batas parlemen. (tin,kum,rls/dya)

PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) membantah anggapan bahwa agenda kunjungan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), ke berbagai daerah merupakan bagian dari safari politik. Menurut PSI, kegiatan tersebut lebih ditujukan untuk memenuhi berbagai undangan dari masyarakat dan sejumlah pihak yang menginginkan kehadiran mantan

RAMAI-RAMAI JELASKAN PEMBUBARAN DISKUSI DI UGM

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memberikan penjelasan terkait insiden pembubaran diskusi publik yang berlangsung di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/6). Forum tersebut menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, serta Sudaryono sebagai narasumber.

Menurut Sudaryono, kehadiran mereka di kampus bertujuan membuka ruang dialog yang demokratis dengan mahasiswa. Ia menegaskan kegiatan tersebut telah direncanakan sejak lama dan memperoleh izin dari pihak kampus.

"Kami datang ke UGM memang untuk berdiskusi. Acara ini sudah direncanakan sejak lama dan telah mendapat izin dari pihak kampus. Ini juga bukan kegiatan pertama semacam ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/6/2026).

Sudaryono mengatakan sejak awal para narasumber memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan pertanyaan maupun kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

"Ditanya apa saja tidak masalah. Diadili seperti apa saja juga tidak masalah. Kami hadir untuk berdialog secara demokratis," katanya.

Ia menjelaskan forum sempat berjalan selama sekitar 30 hingga 40 menit. Namun situasi berubah ketika muncul sekelompok peserta yang meminta kegiatan dihentikan sehingga suasana diskusi menjadi



Wamentan Sudaryono dan Menteri ATR Nusron Wahid saat menghadiri diskusi di UGM.ist

tidak kondusif.

"Kami sempat berdiskusi sekitar 30 sampai 40 menit. Tetapi kemudian ada sekelompok orang yang menginginkan forum dihentikan. Padahal sebagian besar mahasiswa justru ingin mendengar dan berdialog," ungkapnya.

Meski kondisi mulai memanas, Sudaryono mengaku tetap bertahan bersama Nusron Wahid karena meyakini dialog merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan

perbedaan pandangan. Namun keriuhan semakin meningkat setelah terjadi pelemparan air dan dugaan tindakan fisik terhadap dirinya.

"Saya merasa ada yang memukul saya. Ada pelemparan air juga. Karena situasi sudah tidak kondusif, pihak keamanan menyarankan kami keluar," bebarnya.

Ia juga membantah tuduhan bahwa dirinya bersama Nusron Wahid meninggalkan lokasi untuk menghindari dialog dengan

mahasiswa. Menurutnya, justru mereka berupaya melanjutkan komunikasi setelah keluar dari gedung.

"Kalau ada yang mengatakan Sudaryono dan Nusron kabur, itu tidak tepat. Justru kami yang datang untuk berdiskusi. Bahkan saat mobil kami dicegat dan kami dicari-cari, kami keluar lagi dan duduk bersila di aspal untuk melanjutkan dialog," tegas Sudaryono.

Dalam dialog lanjutan tersebut, sejumlah mahasiswa menyampaikan kritik terkait persoalan agraria dan dugaan penggusuran. Menanggapi hal itu, Sudaryono menyatakan kesiapannya untuk memverifikasi langsung setiap laporan yang disampaikan.

"Kalau memang ada penggusuran atau persoalan agraria tertentu, ayo kita cek bersama. Saya bahkan siap menggunakan dana pribadi untuk mendatangi lokasi dan melihat langsung persoalannya," katanya

Sudaryono menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap terbuka terhadap kritik dan menjunjung prinsip demokrasi. Menurutnya, kritik harus ditempatkan sebagai bagian dari proses perbaikan kebijakan. (wid,ist,kum/dya)

DUGAAN KOMCAD DIKERAHKAN SAAT DEMO MAHASISWA



Ratusan mahasiswa menggeruduk acara diskusi di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM). Ist

Demo mahasiswa di Jakarta pada 12 Juni 2026 memicu polemik setelah beredar surat bernomor B/752/VI/2026/BACADNAS yang memerintahkan sekitar 500 ASN dari berbagai kementerian mengikuti "Apel Siaga Komcad" pada hari yang sama dengan aksi demonstrasi.

berlangsung pada hari yang sama."

Menurut Rico, apel siaga merupakan bagian dari pembinaan rutin dan implementasi UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Meski demikian, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor

Keamanan menilai dugaan pengerahan Komcad sebagai "kekeliruan fatal".

"Dalam negara demokrasi, mobilisasi militer seharusnya hanya menjadi opsi terakhir ketika seluruh aparat sipil sudah tidak mampu mengendalikan situasi yang ada."

Dosen hukum Universitas Trisakti, Bhatara Ibnu Reza, menilai jika Komcad benar digunakan untuk mengamankan demonstrasi, maka pemerintah berpotensi melanggar aturan yang dibuat sendiri. Sebab, Komcad dipersiapkan untuk pertahanan negara, bukan menghadapi aksi mahasiswa.

"Artinya, ada kesalahan dan penyalahgunaan kekuasaan." Dan ini jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang ada."

Bhatara juga mengkritik konsep Komcad sebagai warga sipil yang mendapat pelatihan militer.

"Enggak bisa kalau pagi hari menjadi kombatan, siang hari jadi warga biasa."

Ia menilai penggunaan pendekatan militer terhadap demonstrasi menunjukkan kecenderungan militerisasi ruang sipil.

"Sehingga harus dihadapi dengan cara-cara dalam persiapan konflik bersenjata."

Advokat publik Themis Indonesia, Ibnu Syamsy Hidayat, menilai persoalan utama Komcad terletak pada status hukumnya yang berada di antara sipil dan militer.

"Kalau, misalnya, melakukan kekerasan dia akan bagaimana? Apakah dia mendapat impunitas atau bagaimana?"

"Di situlah pengaburan batas antara institusi sipil dan militer." Pandangan serupa disampaikan dosen Universitas Islam Indonesia, Rahadian Difaful Suwartono. Dalam kajiannya tahun 2025, ia menyebut perubahan status anggota Komcad dari sipil ke militer dan sebaliknya sebagai: "Akar ambiguitas." (tin,ist/dya)

LINIMASA GEMPA BUMI MERUSAK DAN DAHSYAT DI WILAYAH PALU

16 Juni 2026

- 6,7 M
- 1 orang meninggal dunia di Sigi, puluhan luka-luka.

28 September 2018

- 7,4 M
- Lebih dari 4.845 orang meninggal/hilang.

1 Januari 1996

- Dahsyat
- Korban jiwa terdapat **minim** namun evakuasi masif.

14/15 Agustus 1968

- 6,0 - 6,7 M
- 200 orang meninggal dunia.

1 Januari 1966

- 7,8 M
- 9 orang meninggal dunia.

● Kekuatan (Magnitudo) ● Korban Jiwa

Kepanikan di RS Samaritan, saat proses evakuasi dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan gempa susulan maupun dampak lain yang dapat membahayakan keselamatan pasien, di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (16/6/2026). (ant)



GEMPA M 6,7 LANDA PALU, LEBIH DARI 45 GUNCANGAN SUSULAN TERJADI

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah pada Selasa (16/6) masih diikuti rentetan gempa susulan hingga malam hari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat aktivitas seismik pascagempa utama terus berlangsung dengan jumlah yang terus bertambah.

Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, menyebut intensitas gempa susulan yang terjadi setelah gempa utama cenderung melemah. Meski demikian, masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan. "Moga-moga insyaallah tidak ada lagi susulan

dan saya meminta masyarakat untuk tenang menghadapi situasi ini. Kita sudah pernah berhadapan dengan kondisi seperti ini," kata Hadianto.

Ia juga meminta masyarakat segera menyampaikan informasi jika menemukan kondisi yang memerlukan

perhatian pemerintah. "Untuk itu saya meminta kepada masyarakat untuk tenang, jangan sampai misalnya ada istilahnya itu informasi-informasi cepat kepada kita terkait hal-hal yang menjadi perhatian dan kebutuhan masyarakat," lanjutnya. (wid,r/s,kum/dya)

Kepala Seksi Observasi BMKG Geofisika Palu, Bambang Haryono, mengatakan bahwa hingga pukul 13.30 WITA pihaknya telah merekam puluhan gempa susulan. "Hingga pukul 13.30 Wita, hasil monitoring BMKG telah terjadi 48 aktivitas gempa bumi susulan dengan kekuatan terbesar M 5,2," ujarnya kepada wartawan, Selasa (16/6).

BMKG menegaskan pemantauan masih terus dilakukan dan informasi terbaru akan disampaikan secara berkala kepada pemerintah daerah maupun masyarakat. Bambang mengimbau warga agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya. Ia juga meminta masyarakat menjauhi bangunan yang mengalami keretakan akibat gempa utama karena dikhawatirkan dapat mengalami kerusakan lebih lanjut jika terjadi gempa susulan.

Menurutnya, "Imbauan kepada masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu, menghindari bangunan yang retak akibat gempa utama, khawatirnya gempa susulan akan menjadi lebih parah lagi walaupun gempanya cukup kecil."

Kenapa Palu Kerap Gempa Bumi?

GEMPA bumi berkekuatan magnitudo 6,7 kembali mengguncang Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Selasa (16/6/2026) pukul 11.27 WITA. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada di daratan pada koordinat 1,03 Lintang Selatan dan 120,24 Bujur Timur dengan kedalaman 10 kilometer. Episenternya terletak sekitar 42 kilometer di tenggara Kota Palu, 54 kilometer di timur laut Kabupaten Sigi, 70 kilometer di barat laut Kabupaten Poso, dan 81 kilometer di tenggara Kabupaten Donggala.

Guncangan dirasakan cukup kuat selama sekitar empat hingga enam detik sehingga membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah untuk mencari tempat yang lebih

aman. Peristiwa ini kembali mengingatkan masyarakat pada sejarah panjang aktivitas kegempaan di Sulawesi Tengah.

Dalam rentang sekitar 85 tahun terakhir, wilayah ini sedikitnya telah mengalami sepuluh gempa besar, yakni pada 1927, 1930, 1938, 1994, dua kali pada 1996, kemudian 1998, 2005, 2008, dan 2012. Sejumlah gempa tersebut bahkan memicu tsunami.

Secara geologis, Sulawesi merupakan salah satu wilayah paling aktif secara tektonik di Indonesia karena berada di zona pertemuan tiga lempeng besar dunia. Kompleksitas pergerakan lempeng inilah yang membuat wilayah tersebut memiliki tingkat kerawanan gempa yang tinggi.

Ahli Geologi Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Ir. Subagyo Pramumijoyo, DEA, menjelaskan bahwa kawasan Palu dan Donggala berada tepat di titik pertemuan tiga lempeng utama dunia, yakni lempeng Indo-Australia, Pasifik, dan Eurasia.

Menurutnya, posisi geografis tersebut membuat daerah itu sangat rentan terhadap aktivitas seismik.

"Palu dan Donggala berada di zona benturan tiga lempeng besar dunia sehingga menjadi daerah yang rawan terjadi gempa," ujar Subagyo dalam keterangan yang dikutip dari laman UGM.

Ia menerangkan bahwa interaksi ketiga lempeng tersebut turut menggerakkan Sesar Palu-Koro, sesar aktif yang menjadi salah satu sumber utama gempa di kawasan Sulawesi Tengah. Sesar ini tergolong sangat aktif dengan laju pergerakan mencapai sekitar 45 milimeter per tahun. Aktivitas sesar inilah yang menjadi pemicu gempa besar magnitudo 7,5 yang melanda Palu pada 2018. Terkait mekanisme gempa di Sulawesi, Subagyo menjelaskan, "Gempa di Sulawesi ini mekanismenya sesar geser yang tidak menimbulkan perubahan volume air laut atau dengan kata lain tidak memicu tsunami." (wid,ist/dya)



4 Pasar Kota Malang Masuk Prioritas Revitalisasi: Blimbing hingga Talun

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mulai mematangkan rencana revitalisasi sejumlah pasar rakyat yang selama ini belum tersentuh revitalisasi total. Sedikitnya empat pasar masuk dalam daftar prioritas, mulai dari pasar tradisional hingga pasar wisata yang berada di kawasan bersejarah di Kota Malang.

"Saat ini terdapat 26 pasar rakyat di bawah pengelolaan Pemkot Malang. Dari jumlah tersebut, pasar tradisional yang belum kami renovasi secara total ada Pasar Blimbing, Pasar Besar, Pasar Tawangmangu, kemudian ada pasar wisata yaitu Pasar Talun yang berada di kawasan Kampung Kayutangan Heritage," ujar Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, Selasa (16/6/2026).

Menurutnya, keempat pasar tersebut telah masuk dalam skala prioritas pembangunan. Karena dinilai membutuhkan pembaruan infrastruktur agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat maupun pedagang.

Sebagai bentuk keseriusan, Eko

mengaku pihaknya telah menyiapkan seluruh dokumen Detail Engineering Design (DED) sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Dengan selesainya tahapan administrasi tersebut, Pemkot tinggal menentukan skema penganggaran untuk merealisasikan proyek revitalisasi.

"Semuanya sudah tahap penyusunan DED. Tinggal nanti kami ajukan ke pimpinan untuk plotting anggarannya, apakah bisa direalisasikan tahun ini atau bergeser ke tahun berikutnya. Yang penting persiapan administrasi sudah kami siapkan," katanya.

Namun, Eko mengakui pelaksanaan fisik revitalisasi diproyeksikan lebih realistis masuk pada tahun anggaran berikutnya. Saat ini pihaknya masih mengajukan perencanaan agar proyek tersebut dapat memperoleh alokasi dana.

"Kami sudah mengajukan perencanaan dan proyeksinya pengajuan tersebut bisa masuk di tahun anggaran berikutnya," jelasnya.

Terkait konsep pembangunan, Eko menegaskan Pemkot Malang menginginkan model pasar rakyat

yang lebih ramah bagi pedagang dan pengunjung. Konsep yang diutamakan adalah bangunan tidak bertingkat dengan tata ruang yang lebih luas sehingga aktivitas jual beli dapat berlangsung lebih nyaman.

Menurutnya, desain tersebut telah diterapkan di sejumlah pasar yang dinilai berhasil, seperti Pasar Klojen dan Pasar Oro-oro Dowo. Dengan konsep tersebut, masyarakat dapat mengakses lapak dengan lebih mudah tanpa harus berpindah lantai, sementara penataan kios menjadi lebih rapi.

"Idealnya pasar rakyat itu tidak bertingkat, bangunannya meluas seperti Pasar Klojen dan Pasar Oro-oro Dowo sehingga mudah dijangkau, mudah diakses, bisa langsung



Kondisi Pasar Tawangmangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. (Santi/Lentera)

transaksi jual beli, serta tertata dengan baik," ungkapnya.

Selain meningkatkan kualitas layanan publik, revitalisasi pasar juga diharapkan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah melalui sektor retribusi. Eko optimistis para pedagang akan lebih berkontribusi apabila pemerintah mampu menyediakan infrastruktur dan pelayanan yang memadai. (Santi/Dya)

Pemkab Malang

Usulkan 60 Desa Penerima Bantuan Lele dari Pusat



Ilustrasi: Petugas Dinas Perikanan Kabupaten Malang melakukan monitoring budidaya ikan lele di Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang. (foto: Dinas Perikanan Kabupaten Malang)

MALANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mengejar kuota bantuan budidaya lele dari pemerintah pusat, dengan mengusulkan 60 desa sebagai calon penerima.

"Ini programnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memang. Di kami sampai dengan pertengahan Juni 2026 sudah ada 60 desa yang kami usulkan sebagai calon penerima bantuan," ujar Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang, Victor Sembiring, dikutip pada Selasa (16/6/2026).

Dari jumlah tersebut, Victor menyebut sebanyak 17 desa telah mengajukan proposal resmi kepada pemerintah pusat. "Sebanyak 17 desa itu juga sudah menjalani verifikasi lapangan dan dinyatakan layak. Di antaranya Desa Sananrejo dan salah satu desa di Kecamatan Lawang," katanya.

Untuk diketahui, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki program berupa bantuan sarana dan prasarana perikanan yang akan disalurkan ke 4.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Dimana Kabupaten Malang menjadi salah satu daerah yang diproyeksikan memperoleh alokasi besar. Sedikitnya 100 desa ditargetkan menerima program hibah tersebut.

Lebih lanjut, Victor menyebut pada tahap awal program akan menyasar

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai penerima manfaat. Selanjutnya, pelaksanaan program akan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berkolaborasi dengan kelompok pembudidaya ikan di masing-masing wilayah.

Desa yang telah dinyatakan layak kini tinggal menunggu penetapan dari pemerintah pusat sebelum pembangunan sarana budidaya dimulai pada tahun ini. Dijelaskannya, bantuan diprioritaskan bagi desa yang telah memiliki embrio usaha budidaya perikanan, seperti budidaya ikan nila maupun lele. Namun, menurutnya KKP lebih mendorong pengembangan komoditas lele karena dinilai lebih ekonomis dan sesuai untuk mendukung kebutuhan gizi masyarakat.

"Lele memiliki biaya produksi yang lebih efisien, dagingnya disukai banyak kalangan, dan durinya tidak terlalu banyak sehingga cocok untuk konsumsi anak-anak," katanya.

Setiap desa penerima akan memperoleh bantuan sarana dan prasarana budidaya berupa kolam beton, benih ikan, serta pakan dengan nilai sekitar Rp1 miliar. Melalui

fasilitas tersebut, setiap penerima ditargetkan mampu memproduksi hingga 10 ton ikan dalam satu siklus budidaya.

"Program ini menerapkan teknologi Recirculating Aquaculture System (RAS) yang mengandalkan sistem sirkulasi dan penyaringan air secara berkelanjutan. Meski mampu meningkatkan produktivitas, sistem tersebut membutuhkan biaya operasional yang relatif tinggi, terutama untuk kebutuhan pompa dan filter air," kata Victor.

Karena itu, menurutnya efisiensi produksi menjadi faktor penting dalam keberhasilan program. Salah satu strategi yang diterapkan adalah memaksimalkan kepadatan tebar benih, khususnya pada budidaya lele, agar hasil panen sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan.

"Sejatinya memang program budidaya tematik ini diharapkan tidak hanya memperkuat pasokan protein untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga menjadi penggerak ekonomi desa melalui peningkatan produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan," tutup Victor. (Santi/Dya)



Dua Bendera, Satu Iran

Laga perdana Iran di Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan drama di lapangan, tetapi juga perdebatan identitas di tribunet stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Dalam pertandingan Grup G yang berlangsung pada Senin (15/6) waktu setempat atau Selasa (16/6) WIB, Iran bermain imbang 2-2 melawan Selandia Baru. Di tengah pertandingan yang disaksikan lebih dari 70.000 penonton itu, dua versi bendera Iran berkibar berdampingan. Ada bendera resmi Republik Islam Iran dan bendera Singa dan Matahari yang identik dengan era sebelum Revolusi Iran 1979. Meski sama-sama berwarna hijau, putih, dan merah, kedua simbol tersebut merepresentasikan pandangan berbeda tentang sejarah dan masa depan Iran. (Reuters)

DEMI KESEPAKATAN DAMAI, AS JANJIKAN RP 5 KUADRILIUN UNTUK IRAN

Pemerintah Amerika Serikat memastikan Iran berpeluang memperoleh dana rekonstruksi senilai 300 miliar dolar AS atau sekitar Rp5 kuadriliun apabila Teheran memenuhi seluruh kewajiban yang tercantum dalam kesepakatan damai yang tengah dirancang kedua negara. Dana tersebut disebut akan didukung oleh negara-negara Teluk sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi Iran pascakonflik.

Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, mengatakan akses terhadap dana tersebut terbuka selama Iran menjalankan seluruh komitmennya. Dalam wawancara dengan CBS News pada Senin (15/6) waktu setempat, Vance menjelaskan bahwa dana rekonstruksi tersebut dapat dicairkan melalui dukungan koalisi negara-negara Teluk.

"Dana tersebut merupakan hal yang dapat mereka akses, dengan didanai oleh koalisi Teluk, sepanjang mereka mematuhi kewajibannya," kata Vance.

Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas klaim Iran yang menyebut mereka akan memperoleh bantuan ekonomi sebesar 300 miliar dolar AS untuk membangun kembali perekonomian dan infrastruktur yang terdampak perang.

Menurut Vance, Washington tidak memiliki keberatan apabila negara-negara Teluk menggelontorkan investasi besar ke Iran. Namun, syarat utamanya adalah Iran harus menghentikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan program nuklir militernya dan membuka diri terhadap pengawasan internasional.

"Kami sepenuhnya terbuka dengan langkah negara-negara Teluk untuk berinvestasi dalam rekonstruksi di Iran. Asalkan Iran mengakhiri program nuklir mereka, menghilangkan uranium diperkaya mereka, dan terbuka sepenuhnya terhadap pengawasan dan langkah

penegakan, yang dapat meyakinkan rakyat Amerika kalau mereka tak akan pernah memiliki senjata nuklir," ujar Vance.

Sebelumnya, kantor berita semi-resmi Iran, Mehr, melaporkan bahwa dalam rancangan nota kesepahaman perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat disebutkan Washington bersama sekutu-sekutunya wajib menjamin upaya pemulihan ekonomi Iran dengan nilai minimal 300 miliar dolar AS. Dokumen tersebut menjadi salah satu poin penting dalam proses normalisasi hubungan kedua negara setelah berbulan-bulan konflik dan ketegangan militer di kawasan Timur Tengah.

Di sisi lain, Iran menegaskan bahwa kesepakatan damai dengan Amerika Serikat tidak dapat dipisahkan dari konflik yang melibatkan Israel dan Lebanon. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan Teheran memandang Amerika Serikat dan Israel sebagai satu kesatuan pihak dalam memorandum perdamaian yang sedang dibangun.

Dalam pertemuan dengan para diplomat asing pada Selasa (16/6), Araghchi menekankan bahwa penghentian konflik di Lebanon menjadi bagian integral dari implementasi kesepakatan tersebut.

"Saya ingin menekankan poin penting: Dari perspektif kami, satu pihak dalam memorandum ini adalah Amerika Serikat dan Israel, pada pihak lain yaitu Iran dan Hizbullah," kata Araghchi.

Menurut dia, stabilitas kawasan tidak akan benar-benar tercapai selama pasukan Israel masih berada di wilayah Lebanon yang diduduki selama perang. Karena itu, penarikan pasukan Israel menjadi syarat penting agar konflik dapat dinyatakan berakhir sepenuhnya.

"Tanpa penarikan pasukan Israel dari wilayah yang mereka jajah selama perang saat ini, perang tak dapat dianggap berakhir sepenuhnya," ujarnya.

Iran juga memperingatkan, setiap serangan baru yang dilakukan Israel setelah penandatanganan memorandum akan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kesepakatan damai. Sikap tersebut mencerminkan upaya Teheran untuk memastikan gencatan senjata tidak hanya berlaku di atas kertas, tetapi juga diterapkan di lapangan, terutama di Lebanon yang selama ini menjadi salah satu titik panas konflik regional.

Perkembangan ini terjadi setelah Amerika Serikat dan Iran dilaporkan mencapai kesepakatan awal untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir empat bulan. Selain penghentian operasi militer, kesepakatan tersebut juga mencakup pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz serta rencana pemulihan ekonomi Iran melalui pencabutan sejumlah pembatasan dan dukungan investasi internasional.

Namun, sejumlah isu krusial

PERBANDINGAN KEKUATAN MILITER ANTARA AS, IRAN, DAN ISRAEL

Anggaran Pertahanan	Personel Aktif
🇺🇸 \$831,5 M	🇺🇸 1.330.000
🇮🇷 \$9,23 M	🇮🇷 610.000
🇮🇸 \$34,6 M	🇮🇸 169.500
Personel Cadangan	Total Pesawat Udara
🇺🇸 500.000	🇺🇸 13.032
🇮🇷 350.000	🇮🇷 551
🇮🇸 465.000	🇮🇸 597
Jet Tempur / Pembom	Tank Tempur (MBT)
🇺🇸 1.800+	🇺🇸 4.500+
🇮🇷 188	🇮🇷 2.675
🇮🇸 239	🇮🇸 1.300
Kendaraan Lapis Baja	Total Armada Laut
🇺🇸 300.000+	🇺🇸 480+
🇮🇷 65.000	🇮🇷 109
🇮🇸 35.000	🇮🇸 82
Hulu Ledak Nuklir	
🇺🇸 5.042	🇮🇷 0
	🇮🇸 90

Sumber: Global Firepower (GFP)

seperti masa depan program nuklir Iran, mekanisme pengawasan internasional, pencabutan sanksi, serta pencairan aset Iran yang dibekukan masih menjadi agenda perundingan lanjutan yang harus diselesaikan kedua pihak. (gus,jaz ist/dya)



Jangan Abaikan Perubahan BAB, Bisa Jadi Sinyal Awal Kanker Pankreas

Kebiasaan memperhatikan kondisi tubuh sering kali dimulai dari hal-hal sederhana. Salah satunya adalah memperhatikan perubahan saat buang air besar (BAB). Meski terdengar sepele, para ahli kini menemukan bahwa tinja atau feses dapat menyimpan petunjuk penting mengenai kondisi kesehatan seseorang, termasuk kemungkinan adanya kanker pankreas.

Kanker pankreas dikenal sebagai salah satu jenis kanker yang paling sulit dideteksi sejak dini. Penyakit ini sering dijuluki "silent killer" karena pada tahap awal jarang menimbulkan gejala yang khas. Banyak penderita baru mengetahui keberadaan kanker ketika penyakit sudah memasuki stadium lanjut dan pengobatan menjadi lebih sulit dilakukan.

Selama ini, gejala kanker pankreas sering berupa kelelahan berkepanjangan, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, gangguan metabolisme energi, nyeri perut atau punggung, hingga gangguan pencernaan. Masalahnya, gejala tersebut sangat mirip dengan keluhan kesehatan sehari-hari sehingga kerap dianggap tidak serius.

Namun penelitian terbaru yang dilaporkan Science Alert menunjukkan adanya harapan baru untuk mendeteksi penyakit ini lebih awal. Peneliti menemukan bahwa kanker pankreas, khususnya jenis pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) yang merupakan tipe paling umum, dapat meninggalkan jejak biologis pada

mikroorganisme yang hidup di saluran pencernaan manusia. Pankreas memiliki saluran yang terhubung langsung dengan usus halus. Karena itu, perubahan yang terjadi pada organ tersebut dapat memengaruhi komposisi bakteri di dalam usus. Perubahan tersebut kemudian dapat terdeteksi melalui analisis sampel feses.

Dalam studi internasional yang melibatkan peneliti dari Finlandia dan Iran pada 2025, ditemukan bahwa pasien kanker pankreas memiliki keragaman mikrobioma usus yang jauh lebih rendah dibandingkan orang sehat. Bahkan, pola bakteri tertentu dapat berfungsi layaknya "sidik jari biologis" yang membantu membedakan individu sehat dengan penderita kanker pankreas.

Untuk mengidentifikasi pola tersebut, para ilmuwan menggunakan teknologi sekuensing gen 16S rRNA yang memungkinkan mereka memetakan jenis dan jumlah bakteri dalam saluran cerna. Hasilnya kemudian dianalisis menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Menariknya, model AI yang dikembangkan mampu mengidentifikasi penderita kanker pankreas hanya berdasarkan profil mikrobioma usus dengan tingkat akurasi yang tinggi.

Perkembangan ilmu mikrobioma memang sedang menjadi perhatian dunia medis. Metode yang lebih canggih seperti shotgun metagenomic sequencing kini memungkinkan

peneliti memetakan seluruh genom bakteri secara rinci. Pendekatan ini mengubah cara pandang ilmuwan terhadap tubuh manusia. Jika dahulu tubuh dianggap sebagai sistem yang berdiri sendiri, kini manusia dipahami sebagai ekosistem kompleks yang hidup berdampingan dengan triliunan mikroorganisme.

Penelitian mengenai hubungan antara mikrobioma dan kanker juga berkembang pesat. Di Inggris, para ilmuwan di Quadram Institute telah menganalisis lebih dari seribu sampel feses untuk mempelajari hubungan antara bakteri usus dan kanker kolorektal.

Hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara mikroba dan kanker bersifat dua arah. Kanker dapat mengubah komposisi bakteri usus, sementara bakteri tertentu juga dapat memengaruhi perkembangan penyakit.

Pola Makan

Meski tidak ada makanan yang dapat menjamin seseorang terhindar dari kanker pankreas, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pola makan sehat dapat membantu menurunkan risiko penyakit kronis, termasuk kanker.

Laporan Harvard Health Publishing dan BBC Good Food menyebut konsumsi sayuran berwarna hijau tua seperti bayam, brokoli, dan kale berkaitan dengan asupan antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan. Buah-buahan kaya

vitamin C seperti jeruk, jambu biji, kiwi, dan stroberi juga direkomendasikan sebagai bagian dari pola makan sehari-hari.

Sumber serat dari gandum utuh, oat, kacang-kacangan, dan biji-bijian turut berperan menjaga kesehatan saluran cerna dan mendukung keseimbangan mikrobioma usus. Sementara itu, ikan berlemak seperti salmon, sarden, dan makarel yang kaya asam lemak omega-3 diketahui memiliki efek antiinflamasi yang baik bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Sebaliknya, para ahli menyarankan membatasi konsumsi daging olahan, makanan ultra-proses, minuman tinggi gula, serta alkohol berlebihan karena berbagai penelitian mengaitkannya dengan peningkatan risiko sejumlah penyakit kronis dan kanker.

Menjaga kesehatan pankreas sebenarnya dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Menjaga berat badan ideal, rutin berolahraga minimal 150 menit per minggu, tidak merokok, mengontrol kadar gula darah, serta mengonsumsi makanan bergizi seimbang merupakan langkah yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan berbagai lembaga kesehatan internasional.

Yang tidak kalah penting adalah tidak mengabaikan perubahan kecil pada tubuh. Kebiasaan memperhatikan kondisi BAB, warna tinja, pola buang air besar, hingga keluhan pencernaan yang berlangsung lama. (ist/dya)

Hoaks Gerhana Matahari 12 Juni 2026, yang Benar 12 Agustus 2026

Informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya gerhana matahari pada 12 Juni 2026 dipastikan tidak benar. Astronom amatir Marufin Sudibyo menegaskan bahwa klaim tersebut merupakan hoaks karena tidak didukung oleh perhitungan astronomi. "Tidak ada peristiwa Gerhana Matahari pada 12 Juni mendatang. Itu hoaks," kata Marufin.

Menurut Marufin, sebuah gerhana matahari hanya dapat terjadi jika memenuhi dua syarat astronomis yang mutlak. Pertama, harus terjadi konjungsi antara Bulan dan Matahari. Kedua, elongasi atau jarak sudut

Bulan saat konjungsi harus kurang dari 0,5 derajat.

"Ada dua syarat mutlak terjadinya Gerhana Matahari: pertama, harus terjadi konjungsi Bulan-Matahari. Kedua, elongasi Bulan pada saat konjungsi terjadi bernilai kurang dari 0,5 derajat," jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa pada 12 Juni 2026 kedua syarat tersebut sama sekali tidak terpenuhi. Berdasarkan perhitungan astronomi, konjungsi Bulan dan Matahari baru akan terjadi tiga hari kemudian, yakni pada Senin, 15 Juni 2026 pukul 09.56 WIB. Namun pada saat itu pun nilai elongasi Bulan masih mencapai 4,6

derajat, jauh di atas batas maksimal yang diperlukan untuk menghasilkan gerhana matahari.

"Posisi Bulan dan Matahari pada Jumat 12 Juni 2026 adalah mustahil untuk bisa menghadirkan Gerhana Matahari," tegas Marufin.

Meski demikian, ia membenarkan bahwa fenomena gerhana matahari memang akan terjadi pada tahun 2026. Hanya saja waktunya bukan pada Juni, melainkan pada 12 Agustus 2026. Pada tanggal tersebut, kedua syarat astronomis yang diperlukan untuk terjadinya gerhana akan terpenuhi. "Dua syarat yang saya sebut di atas akan terjadi pada 12 Agustus 2026 mendatang," ujar Marufin.

Fenomena yang akan berlangsung pada Agustus nanti merupakan Gerhana Matahari Total. Namun, wilayah yang dapat menyaksikannya sangat terbatas karena hanya terjadi di belahan Bumi utara. Area yang terdampak mencakup sebagian Amerika Utara, wilayah barat Afrika, dan sebagian Eropa.

"Tapi hanya terjadi di belahan bumi Utara. Wilayah gerhana hanya meliputi Amerika bagian Utara, Afrika bagian barat, dan separuh Eropa. Lintasan totalitas gerhana hanya melewati pulau Greenland dan Islandia," papar Marufin.

Dengan kondisi tersebut, Indonesia tidak termasuk dalam jalur totalitas maupun wilayah penumbra gerhana. Artinya, masyarakat Indonesia tidak akan dapat menyaksikan Gerhana

Matahari Total yang terjadi pada 12 Agustus 2026 secara langsung dari wilayah Tanah Air.

Penjelasan ini sekaligus meluruskan informasi menyesatkan yang beredar di media sosial mengenai gerhana matahari pada 12 Juni 2026. Berdasarkan perhitungan astronomi, tidak ada kemungkinan terjadinya gerhana pada tanggal tersebut karena syarat utama berupa konjungsi Bulan-Matahari dan elongasi kurang dari 0,5 derajat tidak terpenuhi.

Sebaliknya, fenomena Gerhana Matahari Total yang sesungguhnya baru akan berlangsung pada 12 Agustus 2026, dengan lintasan pengamatan yang terbatas di wilayah Greenland, Islandia, Amerika Utara, Afrika bagian barat, dan sebagian Eropa. Indonesia berada di luar area pengamatan sehingga tidak dapat menyaksikan fenomena tersebut. (ist/dya)



8-10 Juni 2026
(Konjungsi Venus & Jupiter)

15 Juni 2026
(Elongasi Timur Maksimum Merkurius)

21 Juni 2026 (Solstis Juni)

27 Juni 2026 (Hujan Meteor Juni Bootid)

30 Juni 2026
(Bulan Purnama Strawberry Moon)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I **SIDOARJO:** TEGUH A I **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH I **LAMONGAN:** L HANDI I **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA I **KEDIRI:** AIS I **JOMBANG :** SUTONO I **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO I **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO I **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I **TRENGGALEK:** HERLAMBAANG I **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN I **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN I **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN I **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA I **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 I **TELP** 03187854491 I **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I **TELP IKLAN** 031-87854491 I **NIB** 91205006801134 I **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

MEDIA TERVERIFIKASI

Sepatu Pink Kuasai Piala Dunia 2026, Sekadar Gaya atau Strategi Visual?

Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan sengit di lapangan, tetapi juga memunculkan tren fesyen yang mencuri perhatian. Pada laga pembuka antara Meksiko melawan Afrika Selatan di Stadion Azteca, Meksiko, 11 Juni 2026, banyak penonton dibuat penasaran oleh satu pemandangan yang begitu mencolok, dominasi sepatu sepak bola berwarna merah muda atau pink yang dikenakan para pemain.

Di atas hamparan rumput hijau Stadion Azteca, warna pink terlihat sangat menonjol. Pemandangan ini terasa kontras dan berbeda dibandingkan era-era sebelumnya ketika sepatu sepak bola identik dengan warna hitam.

Selama puluhan tahun, warna hitam menjadi standar utama dalam dunia sepatu sepak bola. Namun dalam sekitar dua dekade terakhir, industri perlengkapan olahraga mengalami perubahan besar. Produsen raksasa seperti Nike, Adidas, dan Puma mulai berlomba menghadirkan warna-warna mencolok yang bukan hanya berfungsi sebagai perlengkapan olahraga, tetapi juga bagian dari identitas dan pemasaran atlet.

Menurut laporan TBS News, dominasi warna pink dalam skala besar baru benar-benar terlihat pada Piala Dunia 2026. Fenomena tersebut bukanlah kebetulan semata, melainkan bagian dari arah tren global yang telah diprediksi jauh sebelumnya.

BBC melaporkan bahwa lembaga peramal tren konsumen global WGSN telah memproyeksikan warna electric fuchsia

sebagai salah satu warna paling berpengaruh sepanjang musim panas 2026. WGSN mendeskripsikan electric fuchsia sebagai perpaduan warna merah muda terang dengan sentuhan ungu yang menghasilkan kesan energik, futuristik, dan optimistis.

Belum ada konfirmasi resmi mengenai sejauh mana prediksi WGSN memengaruhi desain sepatu sepak bola. Namun faktanya, tiga produsen perlengkapan olahraga terbesar dunia seperti Nike, Adidas, dan Puma, sama-sama meluncurkan koleksi sepatu berwarna pink terang untuk para pemain yang tampil di Piala Dunia 2026.

Kesamaan pilihan warna dari tiga merek besar tersebut menunjukkan bahwa pink memang sedang menjadi warna yang dianggap memiliki daya tarik kuat secara komersial maupun visual.

Sepak Bola dan Industri Mode Menyatu

Hubungan antara sepak bola dan dunia fesyen semakin erat dalam beberapa tahun terakhir. Tidak sedikit pemain yang kini diposisikan sebagai ikon gaya sekaligus atlet profesional.

Dalam proses pengembangan produk, produsen sepatu olahraga disebut rutin berkonsultasi dengan lembaga seperti WGSN guna membaca arah tren warna, desain, dan preferensi konsumen global.

Pilihan warna pink tidak hanya mengikuti tren mode. Warna tersebut juga memiliki keuntungan praktis yang sangat penting dalam era siaran digital. Salah satu alasan utama warna pink menjadi favorit adalah kemampuannya menciptakan kontras yang sangat kuat dengan rumput hijau lapangan.

Kontras ini membuat pergerakan kaki pemain lebih mudah ditangkap kamera televisi. Penonton dapat lebih cepat mengenali pemain ketika menguasai bola, melakukan umpan, atau melepaskan tembakan. Efek tersebut semakin penting di era media sosial ketika potongan video berdurasi singkat, tayangan slow motion, hingga konten TikTok dan Instagram menjadi bagian utama konsumsi pertandingan.

Bagi produsen sepatu, semakin mudah sebuah produk dikenali dalam tayangan televisi, semakin besar pula nilai pemasaran yang diperoleh.

Sebenarnya tren pink bukan hal yang benar-benar baru di sepak bola elite.

Media olahraga internasional seperti The Athletic dan ESPN beberapa tahun terakhir mencatat meningkatnya penggunaan warna-

warna neon dan cerah dalam sepatu sepak bola profesional. Selain pink, warna volt, kuning neon, oranye terang, hingga ungu elektrik juga semakin banyak digunakan.

Pada Euro 2024 dan Copa America 2024 misalnya, sejumlah pemain top dunia sudah terlihat mengenakan sepatu berwarna pink atau fuchsia. Namun pada Piala Dunia 2026, tren tersebut mencapai puncaknya karena digunakan secara masif oleh pemain dari berbagai negara. Perubahan budaya juga ikut berperan dalam popularitas warna pink.

Laporan BBC dan The Guardian dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa industri fesyen global semakin meninggalkan stereotip lama yang mengaitkan warna tertentu dengan gender tertentu.

Pink kini dipandang sebagai warna yang merepresentasikan keberanian, kreativitas, dan ekspresi diri. Karena itu, penggunaannya di dunia olahraga pria tidak lagi dianggap tidak lazim. Bahkan sejumlah atlet papan atas dari berbagai cabang olahraga mulai menjadikan warna pink sebagai bagian dari identitas personal mereka.

Pengamat pemasaran olahraga menilai warna mencolok memberikan keuntungan besar bagi merek. Menurut analisis Forbes dan Sports Business Journal, perlengkapan olahraga dengan warna yang mudah dikenali memiliki peluang lebih tinggi menjadi viral di media sosial dan menghasilkan penjualan yang lebih besar.

Ketika seorang pemain bintang mencetak gol spektakuler menggunakan sepatu berwarna pink, perhatian publik tidak hanya tertuju pada aksinya, tetapi juga pada produk yang dikenakannya. Dalam industri olahraga modern, nilai eksposur semacam itu bisa bernilai jutaan dolar.

Melihat dominasi pink di Piala Dunia 2026, banyak pengamat memperkirakan warna tersebut masih akan bertahan dalam beberapa musim mendatang.

Selain memenuhi kebutuhan estetika dan tren fesyen, warna pink terbukti efektif dari sisi visibilitas, pemasaran, dan identitas merek. Faktor-faktor inilah yang membuat warna tersebut menjadi pilihan ideal bagi produsen perlengkapan olahraga global. (ist/dya)



Kompur Listrik: ...dari hal 1

Empat tahun setelah program konversi kompor LPG 3 kilogram ke kompor listrik dibatalkan, pemerintah kembali menghidupkan gagasan yang sama. Bedanya, kali ini pemerintah mengklaim telah menyiapkan teknologi yang lebih sesuai untuk kebutuhan masyarakat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kembali mengusulkan program kompor listrik sebagai bagian dari strategi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG. Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Bahlil mengungkapkan pemerintah sedang menyiapkan model kompor listrik yang dapat digunakan oleh rumah tangga dengan daya listrik di bawah 900 VA.

"Sebagai tahap awal, karena ada beberapa model kompor listrik, yang sekarang kami minta itu di sekitar di bawah 900 VA, supaya rakyat yang di daerah-daerah, di desa itu bisa pakai," ujar Bahlil dikutip Selasa (16/6).

Pernyataan tersebut langsung mengingatkan publik pada program serupa yang pernah menuai kontroversi pada 2022. Saat itu pemerintah dan PT PLN (Persero) berencana membagikan ratusan ribu kompor listrik kepada masyarakat sebagai bagian dari program konversi energi rumah tangga.

Namun program tersebut memicu polemik luas. Banyak rumah tangga sasaran merupakan pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA yang dinilai belum mampu menopang kebutuhan daya kompor listrik. Selain itu muncul kekhawatiran mengenai kesiapan instalasi listrik rumah, biaya tambahan yang harus ditanggung masyarakat, hingga perubahan kebiasaan memasak yang selama ini mengandalkan LPG.

Pada September 2022, program itu akhirnya dibatalkan. Pemerintah ketika itu beralasan pembatalan dilakukan untuk menjaga kenyamanan masyarakat yang masih berada dalam masa pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Kini, empat tahun kemudian, program serupa kembali diangkat dengan keyakinan bahwa teknologi yang tersedia telah berkembang dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Meski demikian, hingga kini belum ada penjelasan rinci mengenai teknologi yang dimaksud. Pemerintah juga belum membeberkan berapa jumlah kompor yang akan dibagikan. Kepastian mengenai jumlah unit baru akan diketahui setelah pembahasan anggaran bersama DPR dan diperkirakan diumumkan pada Agustus mendatang.

Yang sudah pasti adalah besarnya anggaran yang disiapkan. Dalam usulan RAPBN 2027, Kementerian ESDM mengajukan dana Rp815,56

miliar untuk program kompor listrik.

"Kompur listrik karena ini untuk kita mengurangi kebutuhan LPG, kita mencari untuk bauran energi lain. Jadi energi yang kita dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tapi kompor listrik, CNG, macam-macam yang kita buat itu sebesar Rp815,56 miliar," kata Bahlil.

Anggaran tersebut menjadi bagian dari program strategis infrastruktur Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) yang nilainya mencapai Rp1,509 triliun. Selain kompor listrik, pemerintah juga mengusulkan Rp635,24 miliar untuk program motor listrik sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional.

Dalam pelaksanaannya nanti, pemerintah meminta dukungan DPR untuk memetakan wilayah yang dianggap paling membutuhkan program tersebut.

"Ini saya pikir kita juga minta bantuan dari Bapak Ibu Anggota DPR

untuk bisa tahu kompor listrik ini yang membutuhkan di daerah-daerah mana saja supaya bisa kita melakukan kerjasama dan sinkronisasi," ujar Bahlil.

Di balik rencana pembagian kompor listrik, sebenarnya terdapat persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar mengganti alat memasak. Pemerintah sedang berhadapan dengan masalah struktural yang selama bertahun-tahun menghantui sektor energi nasional, yakni ketergantungan yang sangat besar terhadap LPG impor.

Menurut Bahlil, sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari luar negeri. Kondisi tersebut membuat Indonesia harus mengeluarkan devisa dalam jumlah yang sangat besar setiap tahun.

"Nilai impor LPG mencapai sekitar Rp120 triliun per tahun," kata Bahlil.

Dengan kondisi harga energi dunia yang masih berfluktuasi, angka tersebut bahkan diperkirakan bisa meningkat menjadi sekitar Rp130

triliun per tahun. Pada saat yang sama, pemerintah juga harus mengalokasikan subsidi LPG dalam jumlah yang terus membengkak. (wid,kum,rls,ist/dya)

Mati Lampu Makin Sering, Siapkah Era Serba Listrik di Indonesia?

DI SAAT pemerintah kembali mendorong penggunaan kompor listrik, motor listrik, hingga berbagai program elektrifikasi rumah tangga, muncul satu pertanyaan yang mulai mengemuka di tengah masyarakat: seberapa siap sistem kelistrikan nasional menopang kebutuhan listrik yang terus bertambah jika pemadaman justru semakin sering terjadi?

Keluhan mengenai mati listrik belakangan ini bukan lagi insiden sporadis. Di berbagai wilayah Jawa hingga Bali, warga mengaku mengalami pemadaman berulang dalam rentang waktu yang relatif dekat. Ada yang mengalami listrik padam beberapa kali dalam seminggu, bahkan dalam beberapa kasus terjadi pada jam-jam sibuk ketika aktivitas rumah tangga, usaha kecil, dan perkantoran sedang berlangsung.

Fenomena tersebut memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik. Salah satu rumor yang sempat beredar menyebutkan pemadaman terjadi karena pemerintah sedang menghemat stok batu bara untuk pembangkit listrik.

Namun penjelasan yang lebih teknis disampaikan Pengamat Sistem Tenaga Listrik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB), Kevin Marojahan Banjar Nahor.

Menurut Kevin, pemadaman yang terjadi belakangan ini setidaknya dipicu oleh dua faktor utama, yakni gangguan mendadak pada sistem kelistrikan atau force

outage serta kebijakan derating.

"Pemadaman listrik yang terjadi belakangan ini di sejumlah wilayah Pulau Jawa ternyata dipicu oleh dua hal utama," kata Kevin.

Force outage merupakan gangguan yang muncul secara tiba-tiba dan tidak direncanakan dalam sistem kelistrikan. Sementara derating adalah keputusan operator pembangkit untuk secara sengaja menurunkan kapasitas produksi listrik di bawah kemampuan maksimal pembangkit.

Di balik kebijakan derating tersebut ternyata terdapat persoalan yang cukup serius. Kevin menjelaskan salah satu penyebabnya berkaitan dengan kondisi pasokan bahan bakar pembangkit, khususnya batu bara dan minyak mentah yang mengalami tekanan dalam beberapa waktu terakhir.

Ketika stok bahan bakar menipis, operator pembangkit tidak dapat terus menjalankan unit pada kapasitas penuh. Dalam kondisi tertentu, kapasitas operasi bahkan harus diturunkan hingga sekitar 60 persen dari kemampuan maksimal.

Langkah tersebut bukan tanpa alasan. Operator berupaya menjaga agar stok bahan bakar tidak habis total sebelum pasokan berikutnya tiba. Sebab jika pembangkit dipaksa beroperasi penuh hingga bahan bakarnya benar-benar habis, risiko yang muncul justru jauh lebih besar.

"Jika dipaksa 100 persen dan bahan bakar itu habis, maka PLTU membutuhkan waktu hingga dua hari untuk menyala kembali atau

TRANSISI KOMPOR LISTRIK DI DUNIA

China: Kisah Sukses

- ✓ Program terintegrasi dengan pengurangan polusi udara
- ✓ Didukung kapasitas listrik rumah tangga yang memadai
- ✓ Banyak apartemen tanpa jaringan gas domestik
- ✓ Kompor induksi sudah menjadi bagian gaya hidup masyarakat urban

Ekuador:

Terkendala Ekonomi & Politik

- ✓ Insentif listrik gratis hingga 80 kWh per bulan
- ✓ Subsidi pembelian kompor induksi
- ✓ Target konversi tidak tercapai
- ✓ Resistensi politik dan infrastruktur listrik belum merata

India: Model Hibrida

- ✓ Mendorong program e-cooking nasional
- ✓ Kendala alat masak tradisional tidak cocok dengan induksi
- ✓ Solusi: penggunaan ganda (induksi + gas LPG)
- ✓ Induksi untuk memasak cepat, gas untuk masakan tradisional

Amerika Serikat & Eropa

- ✓ Didorong agenda iklim dan kesehatan
- ✓ Sejumlah daerah melarang instalasi gas pada bangunan baru
- ✓ Mengurangi paparan polusi udara dalam ruangan bagi anak-anak
- ✓ Adopsi tinggi di kalangan kelas menengah perkotaan



proses startup," ujar Kevin.

Artinya, pemadaman bergilir yang terjadi saat ini pada dasarnya merupakan upaya menghindari situasi yang lebih buruk berupa blackout atau padam total dalam skala luas.

Masalah berikutnya muncul ketika kebutuhan listrik masyarakat mencapai titik tertinggi atau beban puncak. Dalam teori operasi sistem tenaga listrik, setiap sistem idealnya memiliki cadangan daya yang cukup sebagai antisipasi apabila terjadi gangguan mendadak. (wid ist/dya)

DITEMUKAN PELANGGARAN HAM DALAM PROGRAM MBG

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) menemukan indikasi kuat adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kesimpulan tersebut diperoleh setelah lembaga tersebut melakukan pengkajian, penelitian, dan pemantauan terhadap pelaksanaan program yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, menjelaskan bahwa berbagai persoalan mendasar masih ditemukan dalam penyelenggaraan program tersebut. Temuan itu mencakup penentuan sasaran penerima manfaat, tata kelola kelembagaan, kualitas gizi, keamanan pangan, hingga perlindungan terhadap petugas yang



terlibat dalam program.

"Nah, berdasarkan temuan awal tersebut, Komnas HAM menemukan adanya indikasi kuat telah terjadinya pelanggaran HAM dalam pelaksanaan program MBG," kata Uli dikutip Selasa

(16/6).

Salah satu sorotan utama Komnas HAM adalah cakupan penerima manfaat yang dianggap terlalu luas. Menurut lembaga tersebut, pemberian bantuan secara serentak

Rekomendasi Perbaikan MBG

- Prioritaskan kelompok rentan dan wilayah 3T.
- Tingkatkan transparansi data penerima manfaat.
- Wajibkan seluruh SPPG memiliki SLHS.
- Cantumkan informasi kandungan gizi pada menu.
- Bangun sistem pelaporan dan evaluasi digital.
- Susun protokol nasional penanganan keracunan pangan.
- Optimalkan penggunaan bahan pangan lokal.
- Perjelas status kerja dan perlindungan petugas SPPG.
- Buka ruang kritik dan evaluasi publik.
- Ukur dampak MBG terhadap stunting, anemia, dan gizi anak secara berkala.



PERDEBATAN mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin mengemuka setelah Menteri HAM RI, Natalius Pigai, menolak kesimpulan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyebut terdapat indikasi kuat pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaan program tersebut.

Pigai menilai MBG merupakan bagian dari proses pembangunan yang bertujuan memenuhi hak-hak dasar masyarakat sehingga tidak dapat langsung dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.

Menteri HAM Membantah, Sebut Penilaian Terlalu Dangkal

Menurutnya, program tersebut masih berada dalam tahap pemenuhan kebutuhan hak asasi manusia yang terus berjalan.

"MBG itu dalam konteks HAM masih ongoing process of achieving fulfillment on human rights needs. Selain itu, Program MBG adalah proses pembangunan dalam mewujudkan tercapainya standar HAM. Oleh karena itu tidak boleh disebut sebagai pelanggaran HAM. Komentar Komnas HAM jelas sangat dangkal, tidak mengerti prinsip HAM," kata Pigai, Selasa (16/6/2026).

Pigai menegaskan bahwa MBG merupakan instrumen negara untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama kelompok rentan. Karena itu, menurut dia, program tersebut merupakan bagian dari kewajiban negara dalam memenuhi hak dasar warga negara.

Ia juga mengaitkan MBG dengan agenda pembangunan berkelanjutan global atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 yang menekankan pengurangan kemiskinan, kesetaraan sosial, serta pemberdayaan kelompok rentan. "Dalam konteks tersebut, pendekatan pembangunan yang

mengedepankan kesetaraan sosial, pengurangan kemiskinan, dan pemberdayaan kelompok rentan menjadi bagian penting dari strategi pemenuhan HAM," ujar Pigai.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa sasaran utama program adalah kelompok masyarakat yang selama ini tertinggal dan kurang mendapatkan akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar.

"Program MBG secara sengaja berfokus pada mereka yang paling tertinggal terlebih dahulu, berupaya menuju pemberdayaan dan inklusif bagi kaum muda, dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan," lanjutnya. Meski menolak istilah pelanggaran HAM, Pigai mengakui pelaksanaan MBG tetap perlu dievaluasi agar lebih baik.

Namun, menurutnya, evaluasi tidak boleh langsung diikuti dengan kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM.

"Tetapi bahwa perlu penilaian yang bersifat evaluasi, iya. Jangan ujug-ujug sebut pelanggaran HAM. Tidak paham prinsip HAM kalau asal ucap seperti itu," ujarnya. (tin,ist/dya)

kepada seluruh peserta didik dan kelompok rentan berpotensi membuat program tidak tepat sasaran.

Komnas HAM menilai efektivitas program akan lebih tinggi jika difokuskan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama mereka yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kelompok rentan lainnya.

Uli mengatakan, "Penerapan MBG akan lebih efektif dan tepat guna bila difokuskan kepada kelompok khusus atau targeted groups seperti masyarakat di daerah 3T dan kelompok 3B yang sangat membutuhkan pemberian makanan bergizi."

Selain itu, Komnas HAM juga mencatat bahwa hingga kini belum terlihat dampak khusus program MBG terhadap penurunan angka stunting di sejumlah daerah 3T yang seharusnya menjadi prioritas intervensi gizi.

Dalam kajiannya, Komnas HAM menilai tata kelola MBG masih menyimpan sejumlah persoalan struktural.

Lembaga tersebut menyoroti posisi Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjalankan fungsi sebagai regulator sekaligus pelaksana program. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan persoalan dalam mekanisme pengawasan.

Selain itu, pembagian kewenangan antarinstansi dianggap belum jelas. Koordinasi antara BGN dengan pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait juga dinilai masih lemah.

Komnas HAM menemukan bahwa transparansi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih minim. Bahkan, sejumlah sekolah penerima manfaat disebut tidak mengetahui kelengkapan administrasi SPPG yang memasok makanan ke sekolah mereka.

Temuan berikutnya berkaitan dengan orientasi pelaksanaan program yang dinilai lebih berfokus pada jumlah penerima manfaat dibanding kualitas asupan gizi yang diberikan.

Menurut Uli, "Pelaksanaan program MBG masih berfokus pada kuantitas jumlah penerima manfaat belum memperhatikan kualitas gizi dan kebutuhan gizi dari penerima manfaat."

Komnas HAM menilai penerapan standar gizi berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) belum berjalan optimal. Selain itu, masyarakat juga belum mendapatkan informasi yang memadai mengenai kandungan gizi dalam setiap menu yang disediakan. (tin,rls,dtc)